# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu membiayai pengeluaran pemerintah dan membiayai pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Pembangunan pada hakikatnya adalah proses pembaruan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Dana pembangunan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta baik dari dalam negeri maupun dari manca negara. Salah satu sumber dana tersebut adalah dari sektor pajak (Chairil Anwar Pohan : 2013).

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelengarakan pemerintah menurut P.J.A. Adriani yang dikutip oleh (Mohammad Zain : 2008).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Semakin hari peranan penerimaan pajak bagi pembiayaan pengeluaran umum atau negara semakin besar (Gunawan Setiyaji & Hidayat Amir : 2005). Karena bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Erly Suandy : 2011).

Awal tahun 1983 sistem perpajakan Indonesia mengalami reformasi yang sering disebut dengan *Tax Reform,* yaitu perubahan dari *official assessment* menjadi *self assessment* (Erly Suandy : 2011). Perbedaan antara dua sistem ini yakni, dalam *official assessment system*, sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Waluyo : 2011). Sedangkan *self assessment system*, sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo : 2011).

Pada sistem *Self Assessment* segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, dan fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi pajak (Siti Kurnia Rahayu : 2010).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor:184/PMK.03/2015, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *Self Assessment System* merupakan bentuk penegak hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *Self*

*Assesment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan (Siti Kurnia Rahayu : 2010).

Tujuan pemeriksaan pajak ialah untuk menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, kesederhanaan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan (Salip & tendí : 2006).

Kriteria Wajib Pajak yang diperiksa oleh Direktorat Jendral Pajak, antara lain wajib pajak menyampaikan SPT lebih bayar, Wajib Pajak yang melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan atau lantaran ada penilaian kembali aktiva tetap, Wajib Pajak melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, likuiditas/penutupan usaha dan pengambilalihan usaha, Wajib Pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, terdapat hasil analisis, pengembangan atas informasi, data, laporan dan pengaduan hasil analisis risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak (Raden Agus : 2011).

Jenis pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan wajib pajak lokasi dan pemeriksaan tahun berjalan (Erly Suandy : 2011). Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan analisis risiko *(risk based audit)* terhadap data dan informasi yang diterima (Siti Kurnia Rahayu : 2010).

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 tentang kebijakan pemeriksaan, pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis

resiko yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang mengindikasikan potensi penerimaan pajak. Sehingga pengajuan usulan pemeriksaan khusus dari Kantor Pelayanan Pajak kepada Kantor Wilayah DJP harus dilampiri dengan analisis risiko wajib pajak dan berita acara hasil pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko atas Analisis Risiko Wajib Pajak dalam rangka usulan pemeriksaan khusus dan apabila tidak dilampiri analisis risiko maka Kepala Kantor Wilayah DJP akan menolak usulan pemeriksaan khusus tersebut.

Menurut Za'imatul Habibah selaku pelaksana seksi administrasi dan bimbingan pemeriksaan di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I mengemukakan bahwa masih banyak terdapat kendala dalam menerapkan prosedur penyelesaian usul pemeriksaan khusus, diantaranya kurang lengkapnya dokumen sebagai syarat administrasi untuk melakukan usul pemeriksaan khusus dan juga kesalahan dalam menentukan kode pemeriksaan. Sehingga akan menghambat proses pelaksanaan pemeriksaan khusus. Selain itu kurangnya sumber daya manusia untuk para Fungsional Pemeriksa Pajak juga menjadi kendala dalam melakukan pemeriksaan khusus karena jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak yang akan diperiksa tidak sebanding. Akibatnya pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I menjadi kurang optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai prosedur pemeriksaan khusus di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

Dan hasil pengamatan tersebut akan penulis bahas pada laporan kerja praktek yang berjudul :

**"Implementasi Pemeriksaan Khusus Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I".**

## 1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Tujuan laporan kerja praktek ini untuk mengetahui :

1. Prosedur penyelesaian usulan pemeriksaan khusus di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.
2. Hambatan dalam prosedur penyelesaian usulan pemeriksaan khusus di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I untuk menghadapi hambatan pada prosedur penyelesaian usulan pemeriksaan khusus.

## 1.3 Kegunaan Kerja Praktek

### 1.3.1 Kegunaan Praktis

Informasi – informasi yang berhasil dikumpulkan selama kerja praktek ini baik yang diperoleh dari perusahaan maupun literatur, diharapkan akan memberikan manfaat bagi penulis dan bagi instansi.

**1. Bagi Penulis :**

Setelah melaksanakan Kerja Praktek di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, penulis dapat menginput data daftar nominatif untuk setiap jenis pemeriksaan ke

dalam format yang telah terkomputerisasi. Penginputan data tersebut penulis lakukan dengan teliti untuk menghindari kesalahan dalam penginputan data tersebut.

**2. Bagi Instansi :**

Hasil dari kerja praktek di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I ini penulis dapat membantu bagian Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (PPIP) dalam penginputan daftar nominatif yang sebelumnya belum terselesaikan oleh pelaksana. Selain itu penulis membantu mengarsipkan surat masuk dan surat keluar yang belum dipisahkan oleh pelaksana dan membantu kelancaran proses pemeriksaan dengan mengirimkan fax yang berisi tentang dokumen pendukung untuk proses pemeriksaan.

### 1.3.2 Kegunaan Akademis

Secara akademis diharapkan laporan ini dapat memberikan pandangan dan wawasan dalam pengembangan ilmu perpajakan khususnya pada mata kuliah pemeriksaan pajak *(Tax Audit).* Selain itu laporan ini juga diharapkan dapat mengungkapkan informasi ilmiah untuk mengembangkan ilmu yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam penelitian lebih lanjut.

## 1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

### 1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek pada bagian Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen dan Penyidikan (PPIP) di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang beralamat

di Jalan Asia Afrika No 114 Bandung 40261 Telepon : (022) 4231375, 423014, 4232195 Fax : 423504, 4232198.

### 1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Kegiatan kerja praktek ini dilaksanakan dari bulan Mei 2015 sampai dengan November 2015. Untuk tabel aktivitas kantor dan tabel aktivitas kerja praktek dapat dilihat berurutan pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, dan tabel kegiatan kerja praktek dapat dilihat pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.1**
**Aktivitas Kantor**

| No | Hari | Waktu | Aktivitas |
|---|---|---|---|
| 1 | Senin s/d Jum'at | 07.00 s/d 17.00 WIB | Kantor |
| 2 | Senin s/d Jum'at | 12.00 s/d 13.00 WIB | Istirahat |
| 3 | Sabtu s/d Minggu | - | Libur |

**Tabel 1.2**
**Aktivitas Kerja Praktek**

| No | Hari | Waktu | Aktivitas |
|---|---|---|---|
| 1 | Senin s/d Jum'at | 08.00 s/d 16.00 WIB | Kerja Praktek |
| 2 | Senin s/d Jum'at | 12.00 s/d 13.00 WIB | Istirahat |
| 3 | Sabtu s/d Minggu | - | Libur |

**Tabel 1.3**
**Kegiatan Kerja Praktek**

| NO | KEGIATAN | | BULAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEI 2015 | JUN 2015 | JUL 2015 | AGS 2015 | SEP 2015 | OKT 2015 | NOV 2015 | DES 2015 |
| I | **TAHAP PERSIAPAN** | | | | | | | | | |
| | 1 | Permohonan Surat Kerja Praktek | | | | | | | | |
| | 2 | Pengajuan Kerja Praktek ke Perusahaan | | | | | | | | |
| | 3 | Persetujuan Kerja Praktek | | | | | | | | |
| II | **TAHAP PELAKSANAAN** | | | | | | | | | |
| | 1 | Meminta Surat Pengantar Ke Perusahaan | | | | | | | | |
| | 2 | Melaksanakan Kerja Praktek | | | | | | | | |
| | 3 | Pengambilan dan Pengumpulan Data dari Perusahaan | | | | | | | | |
| III | **TAHAP PELAPORAN** | | | | | | | | | |
| | 1 | Pengajuan Judul | | | | | | | | |
| | 2 | Bimbingan Kerja Praktek dengan Dosen Pembimbing | | | | | | | | |
| | 3 | Pembuatan Laporan Kerja Praktek | | | | | | | | |
| | 4 | Ujian Kerja Praktek | | | | | | | | |
| | 5 | Pengumpulan Laporan Kerja Praktek | | | | | | | | |